

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN****UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ASBAR SUMANTRI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **987447**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 70.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.800.000****D. SURAT BERHARGA Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.200.000****F. HARTA LAINNYA Rp. ----****Sub Total Rp. 326.000.000****III. HUTANG Rp. 303.600.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 22.400.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.